RENCANA AKSI
HASIL SURVEY LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu

Tahun 2021

NO	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	KELEMAHAN/KONDISI		RENCANA AKSI	WAKTU BULAN (2021)			WAKTU BULAN (2022)												PIC	KETERANGAN/ DOKUMEN PENDUKUNG
					10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	**Penegakan Integritas dan Nilai Etik**	1	Pimpinan belum seluruhnya memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	Ka. Kanwil melakukan pembinaan kepada ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		2	belum seluruhnya ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)	Ka. Kanwil melaksanakan penandatanagan Pakta Integritas dengan Pejabat eselon III																Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	
		3	Rekan-rekan kerja belum seluruhnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	Upacara rutin setiap tanggal 17 tiap bulan																Bag. Umum dan Humas	
		4	Pegawai belum seluruhnya memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Pemberian satya lencana pada HAB Kemenag RI																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		5	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai belum seluruhnya cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	Pembuatan ASN award untuk pegawai Kanwil																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		6	Dokumen pernyataan aturan perilaku belum seluruhnya disampaikan kepada seluruh pegawai	Lomba Pembacaan UUD, Pancasil dan Panca Setya Kopri																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		7	Dalam sosialisasi aturan perilaku belum seluruhnya dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari	Pembinaan dari Pimpinan atau Tokoh untuk ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		8	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun belum seluruhnya diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, Satuan kerja/UPT lainnya)	Sosialiasi Program dan Kegiatan di Website																Bag. Umum dan Humas	
		9	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) belum seluruhnya menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai	Penyampaian informasi melalui website																Bag. Umum dan Humas	
		10	Pernyataan aturan perilaku belum seluruhnya dipahami oleh semua pegawai	Apel pagi setiap Hari Senin dan Jumat																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		11	Pimpinan belum seluruhnya memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	Pembinaan dari Pimpinan																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		12	Belum seluruhnya terdapat fungsi khusus di dalam Satuan Kerja/UPT anda yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku	Pembentukan Tim Penangaanan Pengaduan Masyarakat																Bag. Ortala dan KUB	
		13	Pimpinan belum seluruhnya mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di Satuan Kerja/UPT anda	Pembinaan dari Pimpinan																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		14	Pelanggaran aturan perilaku belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat																Bag. Ortala dan KUB	

2	**Komitmen Terhadap Kompetensi**	1	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya memiliki strategi/ rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja anda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya		Usulan rencana pelatihan/diklat ke Balitbang/Badiklat Kemenag RI																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		2	SDM yang memadai belum seluruhnya tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi		Pembuatan Anjab dan ABK																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		3	Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya didefinisikan seluruhnya secara		Pembuatan Anjab dan ABK																	Bag. Ortala dan KUB	
		4	Para pegawai belum seluruhnya ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut		*Pembuatan Anjab dan ABK*																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		5	Pimpinan belum seluruhnya memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja		Diklat Pengawas dan Administator																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		6	Kompetensi SDM belum seluruhnya dipantau secara efektif		Melaksanak Capacity Building																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		7	Pelatihan yang memadai belum seluruhnya selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting		Diklat Pengawas dan Administator																	Bag. Ortala dan KUB	
		8	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting		Melaksanakan Assesmen Pegawai																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		9	Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai belum seluruhnya memadai dan dimutakhirkan secara periodik		Update Aplikasi MAYSAPK dan Simpeg5																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		10	Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci belum seluruhnya dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap		Melaksanakan Assesmen Pegawai																	Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		11	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum seluruhnya dilakukan secara periodik		Melaksanakan Assesmen Pegawai																	Bag. Ortala dan KUB	
3	**Kepemimpinan Yang Kondusi**	1	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan belum selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal		Monitoring dan Evaluasi penanganan benturan kepentingan																	Bag. Ortala dan KUB	
		2	Pimpinan belum seluruhnya mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat		Mengikuti Pembinaan dari Pimpinan Pusat terkait manajemen resiko																	Bag. Ortala dan KUB	
		3	Gaya dan tone kepemimpinan yang kondusif belum seluruhnya dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi		Melaksanakan evaluasi survey lingkungan pengendalian																	Bag. Ortala dan KUB	
		4	Pimpinan belum seluruhnya membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP		Pembentukan Satgas SPIP																	Bag. Ortala dan KUB	
		5	Pimpinan belum seluruhnya menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi		Sosialisasi Peran Penguatan Pengawasan dari BPKP/ Inspektorat Jenderal Kemanag RI																	Bag. Ortala dan KUB	
		6	Pimpinan belum seluruhnya mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait		Pembinaan Kanwil terkait Pengendalin Internal kepada ASN																	Bag. Ortala dan KUB	

		7	Pimpinan belum seluruhnya mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern		Rapat Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP																Bag. Ortala dan KUB	
4	**Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan**	1	Struktur organisasi belum seluruhnya dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya.		Melakukan penyesuaian dan analisis organisasi setelah penyederhanaan organisasi																Bag. Ortala dan KUB	
		2	Seluruh unit organisasi belum seluruhnya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu.		Membuat SOP kegiatan dan menginplemetasikan secara optimal																Bag. Ortala dan KUB	
		3	Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi belum seluruhnya diperhitungkan pimpinan Satuan Kerja/UPT anda		Melakukan penyesuaian dan analisis organisasi setelah penyederhanaan organisasi																Bag. Ortala dan KUB	
		4	Struktur organisasi yang ada belum seluruhnya mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian		Melaksanakan manajemen resiko pada setiap unit organisasi berdasarkan kegiatan																Bag. Ortala dan KUB	
		5	Struktur organisasi belum seluruhnya dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai		Membuat struktur organisasi beserta tanggung jawab dan fungsi setiap pegawai																Bag. Ortala dan KUB	
		6	Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci belum seluruhnya ditetapkan dan dimutakhirkan		Menyusun uraian tugas pejabat																Bag. Ortala dan KUB	
		7	Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi belum seluruhnya dilakukan secara berkala		Membuat SOP kegiatan dan menginplemetasikan secara optimal																Bag. Ortala dan KUB	
5	**Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat**	1	Pimpinan belum seluruhnya melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP		Pimpinan melakukan reviu atas manajemen resiko yang dibuat oleh pemilik resiko																Bag. Ortala dan KUB	
		2	Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan belum seluruhnya secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP		melakukan monitoring dan evaluasi *pelaksanaan SPIP*																Bag. Ortala dan KUB	
		3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum seluruhnya ditetapkan dan didokumentasikan secara formal		Membentuk Satgas SPIP pada Satuan Kerja																Bag. Ortala dan KUB	
		4	Kriteria pendelegasian wewenang belum seluruhnya tepat		Menyusun tugas dan fungsi satgas SPIP																Bag. Ortala dan KUB	
		5	Pejabat kunci (key management) yang diberi kewenangan belum seluruhnya memahami tanggung jawab dan wewenangnya		melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP																Bag. Ortala dan KUB	
		6	Kewenangan belum seluruhnya direviu dan dimutakhirkan secara periodik		melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP																Bag. Ortala dan KUB	
		7	Wewenang dan tanggung jawab belum seluruhnya dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai		melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP																Bag. Ortala dan KUB	
		8	Batasan kewenangan belum seluruhnya diverifikasi dan diuji		valiadasi dan verifikasi tehadap laporan pelaksanaan kegiatan																Bag. Ortala dan KUB	
		9	Proses dan tingkatan otorisasi belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan		Penyusunan SOP terintegrasi																Bag. Ortala dan KUB	
6	**Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM**	1	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum seluruhnya didokumentasikan secara formal		Pengelolaan data SDM ASN berdasarkan potensi dan pendidiakan																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		2	*Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM* tersebut belum seluruhnya disosialisasikan kepada seluruh pegawai		*Sosialisasi peran dan tugas fungsi* ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	

		3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum seluruhnya dipahami oleh seluruh pegawai		Sosialisasi peran dan tugas fungsi ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		4	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum seluruhnya lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)		Sosialisasi dan Diklat kepada ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		5	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum seluruhnya dimutakhirkan sesuai kebutuhan		Pengelolaan data SDM ASN berdasarkan potensi dan pendidiakan																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		6	Pimpinan belum seluruhnya menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik		Mutasi pegawai secara periodik kepada ASN dalam rangka penyegaran																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		7	Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci belum seluruhnya mempertimbangkan integritas dan kompetensinya		Assesmen dan Kompetensi ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		8	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya menempatkan SDM pada posisi kunci melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)		Assesmen dan Kompetensi ASN																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		9	Program pelatihan belum seluruhnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)		Menyusun dan mengusulkan diklat kepada Badiklat/Pusdiklat																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		10	Setiap pegawai belum seluruhnya mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan		Menyusun dan mengusulkan diklat kepada Badiklat/Pusdiklat																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		11	Program pelatihan yang terselenggara belum seluruhnya mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber-SPIP		Melaksanakan Program Pendampingan SPIP dari BPKP atau Itjen Kemanag RI																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		12	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM		Mengusulkan program peningkatan kapasitas pegawai (capacity building)																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		13	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan inter personal skill.		Menyusun dan mengusulkan diklat kepada Badiklat/Pusdiklat																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		14	Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut belum seluruhnya diterapkan sesuai ketentuan.		Melaksanakan aturan dan kriteria untuk memberikan reward																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		15	Satuan Kerja/UPT anda belum seluruhnya memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan produktivitas pegawai/unit kerja.		Pemberian penghargaan dan reward kepada Pegawai yang berprestasi																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
7	**Perwujudan peran APIP yang Efek**	1	APIP belum seluruhnya melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik.		APIP melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPIP																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		2	APIP belum seluruhnya memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja/UPT Pemerintah		APIP melakukan pembinaan SPIP pada Satuan kerja																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		3	APIP belum seluruhnya berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di Satuan Kerja/UPT anda		APIP melakukan pembinaan SPIP pada Satuan kerja																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		4	APIP belum seluruhnya melaksanakan pengawasan berbasis risiko.		APIP melaksanakan audit pengawasan berbasis resiko																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		5	APIP belum seluruhnya melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.		APIP melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPIP																Bag. Hukum dan Kepegawaian	

		6	APIP belum seluruhnya melakukan pengujian keuangan secara periodik		APIP melakuan monev pengujian keuangan																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		7	APIP belum seluruhnya melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik		APIP melakukan pembinaan SPIP pada Satuan kerja																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		8	APIP belum seluruhnya melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya		APIP melakukan reviu atas Kepatuhan hukum																Bag. Hukum dan Kepegawaian	
		9	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti.		Monitoring dan Pendampingan Penyelesaian TLHP																Bag. Hukum dan Kepegawaian	

Bengkulu , November 2021
Ketua Tim Kerja,

Drs. H. Hamdani, M.Pd
NIP. 196811071997031005